

JURNAL DISERTASI
KONFLIK AGRARIA DALAM RELASI ANTARA
PERUSAHAAN PERKEBUNAN DENGAN MASYARAKAT
(KASUS KONFLIK ANTARA PETANI DENGAN PT. PP LONSUM DI KABUPATEN BULUKUMBA)

**AGRARIAN CONFLICT IN RELATION BETWEEN COMERCIAL AGRICULTURAL ENTERPRICE AND
THE COMMUNITY**
(CONFLICT CASE BETWEEN PEASANT AND PT. LONSUM IN BULUKUMBA REGENCY)

Musdalifah

ABSTRAK

MUSDALIFAH, Konflik Agraria dalam Relasi antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi : 1) relasi antara aktor pemerintah, swasta dan masyarakat pada level mikro dan makro dalam terjadinya konflik antara PT. Lonsum dengan masyarakat tani; 2) Dampak positif, negatif dari aspek ekonomi dan sosial antara PT. Lonsum dengan masyarakat tani; 3) Dialektika pertimbangan moral dan rasional petani serta pengaruh faktor eksternal dalam mengubah konflik laten menjadi konflik manifest antara PT. Lonsum dengan masyarakat tani; dan 4) Bentuk-bentuk resolusi konflik dalam proses akomodasi antara PT Lonsum dengan masyarakat tani.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data kualitatif berdasarkan kata-kata yang disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas. Lokasi penelitian yaitu Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang dan Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumba sebagai desa dimana terdapat lahan yang diperebutkan atau merupakan dua lokasi objek terjadinya konflik. Sedangkan lokasi penelitian lainnya adalah Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe dan Desa Tibona Kecamatan Bulukumba merupakan dua lokasi yang tidak mengalami konflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat digambarkan sebagai hubungan keterikatan antara kepentingan pemerintah terhadap keberadaan perusahaan perkebunan PT. Lonsum, kekuasaan pemerintah sebagai penentu kebijakan, serta hak guna usaha yang dimiliki PT. Lonsum dan hak masyarakat yang merupakan warisan nenek moyang.

Keberadaan perusahaan perkebunan PT. Lonsum menimbulkan dampak positif dan negatif dari aspek sosial maupun ekonomi, dimana keterlibatan perusahaan di bidang ekonomi, mampu mendominasi pergerakan ekonomi masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, meskipun di satu pihak menimbulkan pengaruh sosial berupa konflik yang berkepanjangan.

Dialektika konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Bulukumba telah berkembang dari konflik yang cenderung tertutup (laten), kemudian mencuat dan selanjutnya menjadi konflik *manifest* akibat tindakan agresif pihak perusahaan yang mendorong terjadinya tindakan perlawanan yang didasari oleh pertimbangan moralitas melalui protes, perlawanan, bahkan revolusi petani sebagai suatu tindakan defensif melawan kapitalisme yang mengancam keamanan subsistensi masyarakat, dan pertimbangan rasionalitas melalui kesepakatan melakukan perlawanan yang dinilai sebagai cara yang efektif dan efisien dalam menuntut hak-hak mereka.

Berbagai ikhtiar rekonsiliasi yang telah dilakukan dijadikan modal dalam mewujudkan penyelesaian konflik secara menyeluruh dan permanen sebagai wujud bentuk resolusi konflik yakni melalui konsultasi publik, negosiasi, mediasi dan arbitrase.

ABSTRACT

MUSDALIFAH, *Agrarian Conflict in Relationship between Plantation Company and Community in Bulukumba Regency*

The aims of study were to analyze and identify (1) the relationships between government, private and community at the micro and macro levels in the occurrence of conflict between PT. Lonsum and farmers community (2) positive and negative impacts of socioeconomic aspects between PT. Lonsum and farmers community (3) dialectic of moral and rational considerations of farmers and impact of external factor in changing the latent conflict to manifest conflict between PT. Lonsum and farmers community and (4) form of conflict resolution in the accommodation process between PT. Lonsum and farmers community.

The study used a qualitative approach by means of qualitative data analysis based on extended text. The study was conducted at Bontobiraeng village, Kajang district and Bontomangiring village Bulukumba district as the places where the land conflict occurred. The other research locations were Tamatto village, Ujung Loe district and Tibona village, Bulukumba district as non-conflict areas.

The results of the study indicate that the relationship between government, company and community is described as a linkage relationship between the government interest and the existence of PT. Lonsum, the government power as the policy maker and the business concessions owned by PT. Lonsum and community rights as the ancestor's inheritance.

The existence of the PT. Lonsum causes positive and negative impacts from socioeconomic aspects in which the involvement of the company in economic field is able to dominate the growing and developing economic movement of the community although it causes a social impact in the form of prolonged conflict.

Agrarian dialectic conflict occurred in Bulukumba regency has developed from the conflict which tend to be closed (latent) then rises to become a manifest conflict due to an aggressive act of the company. This encourages the opposition based on moral considerations through protest, opposition and even revolution by the farmers as a defensive act against capitalism threatening the security of the community subsistence and rationality consideration through an agreement to opposition as an effective and efficient way in claiming their rights.

Various reconciliation efforts have been done to settle the conflict comprehensively and permanently as the realization of the conflict resolution, namely through public consultation, negotiation, mediation and arbitration.

A. Latar Belakang

Kasus konflik agraria di Sulawesi Selatan menurut Data-Base KPA, secara keseluruhan ada 48 kasus yang meskipun bukan merupakan peringkat teratas, tetapi konflik yang terjadi tersebut merupakan satu bentuk konflik sosial yang penting. Konflik pertanahan yang terjadi di areal perkebunan tidak bisa dilepaskan dari perubahan agraria (*agrarian transformation*) yang terjadi di daerah sejak akhir abad ke-19 ketika perkebunan besar mulai dikembangkan. Bahkan dari seluruh kasus konflik pertanahan yang terjadi yang direkam oleh Data-Base KPA merupakan konflik pertanahan yang memiliki hubungan erat dengan kebijakan pemerintah kolonial untuk membuka lahan-lahan perkebunan besar (Lounella dan Zakaria, 2002).

Empat faktor yang saling berinteraksi inilah yang secara hipotetik menyebabkan terjadinya konflik agraria yang terjadi antara pemilik kapital yakni PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera (PT PP Lonsum) dengan masyarakat petani di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Konflik ini bermula pada tahun 1981 akibat pengusuran tanah seluas 546,6 ha di Desa Bonto Biraeng dan 373 ha di Desa Jojolo, kemudian berlanjut di tahun 1982 pihak perusahaan PT PP Lonsum melakukan penanaman karet di Desa Tambangan seluas 200 ha, sambil mengancam masyarakat yang berani melawan dengan senjata. Pada saat tersebut sebanyak 253 petani di beberapa desa di Kecamatan Bulukumba dan Kajang mulai berjuang mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah. Namun setelah itu Desa Tibona seluas 500 ha digusur. PT Lonsum juga berhasil menguasai lahan yang digarap rakyat di Desa Bonto Biraeng pada Tahun 1984. Dua tahun kemudian (1986), lima petani ditangkap karena melawan pemerintah. Pengusuran terjadi di Desa Tugondeng seluas 30 ha. Sejumlah rumah dan kebun juga digusur dan dibakar. Kondisi ini kemudian terulang kembali pada tahun 1988, dengan mengusur Desa Tammato seluas 800 ha dan banyak rumah yang dibakar. Beberapa tanah adat yang dianggap keramat oleh suku Kajang juga digusur. Tahun 1989-1991, Desa Tibona seluas 500 ha digusur, masyarakat yang melawan dengan cara membakar pohon karet kemudian ditangkap polisi. Pengambilan tanah seluas 300 ha di Desa Bonto Mangiring, dan pengusuran 300 rumah dengan bulldoser, sementara masyarakat yang mencoba bertahan kemudian ditembak terjadi pada tahun 1994 (Tempo, 7/01/2004).

B. Metode Penelitian

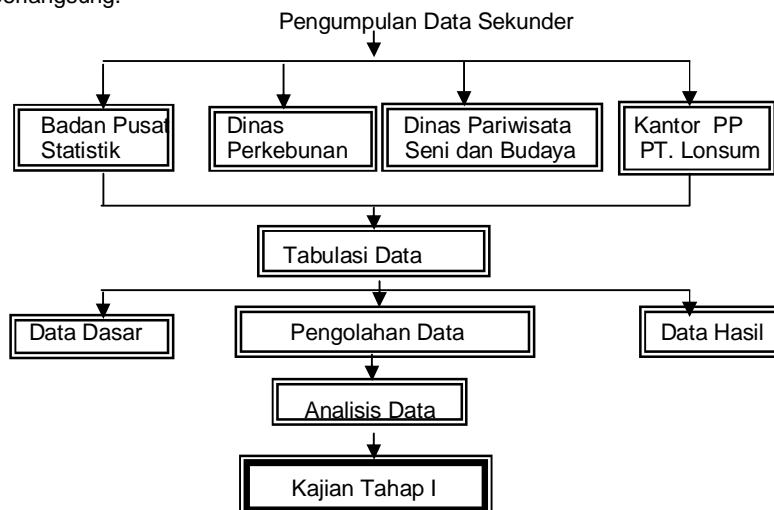
1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang dan Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumba sebagai desa dimana terdapat lahan yang diperebutkan atau merupakan dua lokasi objek terjadinya konflik. Sedangkan lokasi penelitian lainnya adalah Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe dan Desa Tibona Kecamatan Bulukumba merupakan dua lokasi yang tidak mengalami konflik.

2. Sumber Data dan Penentuan Informan

Penelitian ini membutuhkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya serta Kantor Perusahaan Perkebunan PT. Lonsum. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari informan yang terlibat langsung awal terjadinya konflik sampai turunnya putusan MA yang menentukan eksekusi terhadap lahan baik dari pihak PT. PP Lonsum, pemerintah daerah, kepolisian, pertanahan, DPRD, camat, kepala desa, kepala dusun, pemuka masyarakat, LSM dan masyarakat (pemilik lahan). Informan ini ditanyakan proses terjadinya penyerangan dan reklamasi dan siapa-siapa saja yang bisa dipilih menjadi informan berikutnya. Demikian proses ini berlanjut sehingga data dianggap cukup. Dalam pengumpulan data prinsip triangulasi pengumpulan data diperlukan, dalam arti suatu temuan penting tidak hanya diandalkan informasi pada satu sumber tetapi pada beberapa sumber sepanjang data yang dikumpulkan belum cukup.

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa; (1) status tanah yang menjadi obyek konflik, menurut masyarakat, PT Lonsum dan pemerintah; (2) luas tanah yang dituntut kembali; (3) luas tanah yang diklaim oleh pihak PT Lonsum termasuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) mereka; (4) sisi historis dari konflik antara masyarakat dengan PT Lonsum dan; (5) kondisi sosial ekonomi masyarakat petani sebelum dan selama konflik berlangsung.



Gambar 1. Proses Pengumpulan Data Penelitian Kuantitatif

Penentuan informan didasarkan pada informasi awal tentang warga komunitas yang terlibat konflik agraria. Identifikasi ini tidak bermakna sempit, karena tidak dibatasi dalam wilayah lokasi fisik semata. Terdapat pula para informan yang tidak menetap di Bulukumba, tetapi merupakan bagian masyarakat Bulukumba yang pahan tentang Bulukumba dan dinamika sosial budayanya, terutama mengenai fenomena konfliknya. Penentuan informan dengan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*) dikombinasikan dengan metode *snowball sampling*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Data kualitatif yang mendalam diperoleh melalui penggunaan berbagai instrumen penelitian kualitatif; yaitu dengan pengamatan (observasi) dan pedoman pertanyaan (*guideline of interview*). Strategi dan teknik ini sengaja dipilih untuk menangkap realitas secara holistik, sebagai implikasi digunakannya pendekatan kualitatif.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian tentang konflik agraria relasi antara perusahaan perkebunan PT. Lonsum dengan masyarakat tani Bulukumba yang berupa jawaban-jawaban, ucapan-ucapan, atau perilaku yang tampak berdasarkan empati, rapport, maupun tipifikasi berbagai fenomena yang ditemui di lapangan, merupakan esensi dari penelitian kualitatif untuk memahami secara mendalam arti tindakan-tindakan serta fenomena yang terjadi dalam konflik agraria yang terjadi di sekitar wilayah mereka.

Penggalian data menggunakan berbagai sumber dan teknik yang disebut data *triangulation* maupun *investigator triangulation* (Denzim, 1994 *dalam* Bungin, 2001), yakni metode pengumpulan data dengan menggunakan beberapa cara pengumpulan data seperti observasi, wawancara tak berstruktur, dokumentasi, interpretasi dokumen sejarah oral dan pribadi, introspeksi dan refleksi diri.

4. Metode Analisis

Metode analisis utama yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dan pengamatan ditulis dalam suatu catatan lapangan yang terinci, data dari catatan lapangan inilah yang dianalisis secara deskriptif.

Tahap pertama analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data yang terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Dalam proses ini dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan data yang tidak memenuhi kriteria eksklusi-inklusi

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat menggabungkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang dan bersiklus.

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan tiga tahapan analisis tersebut. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan abstraksi-abstraksi teoritik terhadap informasi di lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang terus menerus secara simultan sepanjang proses penelitian.

C. Hasil Penelitian

1. Sejarah dan Kronologis Konflik

Tabel 1. Kronologis Hak Guna Usaha PT PP Lonsum Sulawesi Estate

No	Dasar dan Kronologi Penguasaan	Tahun Pembaharuan HGU	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perolehan hak penguasaan dari pemerintah Hindia Belanda dengan Hak Erfpacht yang dikonversi menjadi HGU pada tahun 1960	1919	7.092,82
2	Dikeluarkan tanah HGU untuk Homebase Kodam (Berdasarkan surat Bupati Kepala Daerah Bulukumba No. 92/BD/VII tanggal 22 Juni 1973)	1973	500,00
3	HGU Pertama diperbaharui Areal HGU dikeluarkan untuk pemukiman masyarakat di Dusun Cambaya, Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto yang telah dikuasai pada tahun 1975	1974	6.692,58
		1997	56,12
4	Dikeluarkan areal HGU berdasarkan hasil perdamaian Bandung pada tahun 1985	1997	143,00

5	Dikeluarkan areal HGU untuk pemukiman dan tanah garapan di Desa Bulu-Bulo dan Desa Bontomangiring yang telah dikuasai masyarakat pada tahun 1995	1997	300,00
6	Dikeluarkan areal HGU untuk pemukiman di Dusun Lembang Mmena Desa Balleanging yang telah dikuasai masyarakat pada tahun 1995	1997	30,00
7	Dikeluarkan areal HGU untuk tanah garapan di Dusun Pintujung Desa Balleanging yang telah dikuasai masyarakat pada tahun 1995	1997	279,00
Luas HGU terakhir			5.784,47

Sumber : Data Sekunder setelah diolah, 2007

2. Konflik Agraria dan Faktor Penyebabnya

Pertama, konflik pertanahan terjadi hampir di seluruh wilayah ekspansi PT. PP Lonsum disebabkan oleh tidak diakuinya bukti yang dimiliki masyarakat. PT. PP Lonsum dalam melakukan pembebasan lahan hanya mengacu pada bukti-bukti legal formal saja. Sebagai contoh terjadi di Pergulaan Sumatera Utara, dimana tanah masyarakat dirampas oleh PT. PP Lonsum Rambong Sialang Estate. Tanah yang diperoleh masyarakat dengan melakukan pembukaan lahan hutan 1939, secara legal kemudian disahkan dengan ditandai oleh Asisten Wedena Seri Rampah pada tahun 1955, selanjutnya mendapatkan hak atas tanah dalam bentuk kartu sebagai pemakai tanah yang dilindungi UU No 8 Tahun 1954.

Kedua, kondisi masyarakat yang menjadi buruh kebun belum terpenuhi hak-haknya. Seperti bisa dilihat di wilayah Perkebunan Trebrasala dimana masyarakat yang hidup di wilayah perkebunan (*afdeling*) yang bekerja menjadi buruh sama sekali tidak memiliki tempat tinggal.

Ketiga, konversi lahan kebun Lonsum di lahan-tanah rakyat memunculkan konflik dan pemiskinan sumber-sumber milik rakyat, konflik horizontal antara masyarakat adat, buruh, petani dan pemerintah di tingkat desa sehingga menciptakan perpecahan hubungan sosial kemasyarakatan.

3. Relasi Antar Aktor Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat Petani

PT. Lonsum sebagai pemilik ijin HGU mengaku memiliki hak penuh terhadap lahan perkebunan karet di wilayah Kabupaten Bulukumba Sementara masyarakat berusaha melakukan perlawanan atas hak tanah/lahan yang telah mereka garap secara turun temurun. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Relasi Antara PT. Lonsum dengan Masyarakat ditinjau dari Karakteristik dan Peranan dalam Konflik, Kabupaten Bulukumba, 2007

No	Pihak PT. Lonsum	Pihak Masyarakat
1	Karakteristik Pemilik ijin HGU sejak tahun 1968 hingga 2022; berusaha mengamankan aset perusahaan (lahan) agar tidak diambilalih oleh pihak lain dengan membatasi akses masyarakat terhadap SDA	Karakteristik Berusaha melakukan perlawanan atas hak tanah/lahan yang telah mereka garap secara turun temurun
2	Peranan Pelaku utama konflik, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mendorong konflik sekaligus yang dapat meredakan konflik dalam waktu tertentu	Peranan Pelaku utama yang awalnya telah melakukan aksi protes sampai saat melakukan aksi perlawanan pada puncak ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada

Sumber data : Data Primer dan Sekunder Setelah diolah, 2007

Relasi antara perusahaan perkebunan PT. Lonsum dengan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Relasi Antara PT. Lonsum dengan Pihak Pemerintah Daerah ditinjau dari Karakteristik dan Peranan dalam Konflik, Kabupaten Bulukumba, 2007

No	Pihak PT. Lonsum	Pihak Pemerintah Daerah
1	Karakteristik Pemilik ijinHGU sejak tahun 1968 hingga 2022; berusaha mengamankan aset perusahaan (lahan) agar tidak diambilalih oleh pihak lain dengan membatasi akses masyarakat terhadap SDA	Karakteristik Lembaga pemerintah yang tidak melakukan upaya nyata dalam penyelesaian konflik
2	Peranan Pelaku utama konflik, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mendorong konflik sekaligus yang dapat meredakan konflik dalam waktu tertentu	Peranan Pemegang kebijakan yang seolah-olah berpihak pada pihak perusahaan

Sumber data : Data Primer dan Sekunder Setelah diolah, 2007

Relasi antara perusahaan perkebunan PT. Lonsum dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Relasi Antara PT. Lonsum dengan Pihak LSM ditinjau dari Karakteristik dan Peranan dalam Konflik, Kabupaten Bulukumba, 2007

No	Pihak PT. Lonsum	Pihak LSM
1	Karakteristik Pemilik ijinHGU sejak tahun 1968 hingga 2022; berusaha mengamankan aset perusahaan (lahan) agar tidak diambilalih oleh pihak lain dengan membatasi akses masyarakat terhadap SDA	Karakteristik Memiliki kemampuan untuk melakukan advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat, memiliki akses terhadap informasi dan memiliki jaringan terhadap lembaga swadaya lainnya maupun lembaga lainnya. Sebagai tempat konsultasi masyarakat dan membantu masyarakat membentuk kelompok-kelompok perlawanan
2	Peranan Pelaku utama konflik, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mendorong konflik sekaligus yang dapat meredakan konflik dalam waktu tertentu	Peranan Sebagai fasilitator masyarakat dalam melakukan konsultasi publik dan mengakses lembaga-lembaga di tingkat kabupaten. Melakukan fungsi penyadaran terhadap hak masyarakat terhadap tanah dan sebagai pemicu konflik yang terjadi

Sumber data : Data Primer dan Sekunder Setelah diolah, 2007

Tabel 5. Relasi Antara PT. Lonsum dengan Pihak Aparat Keamanan ditinjau dari Karakteristik dan Peranan dalam Konflik, Kab.n Bulukumba, 2007

No	Pihak PT. Lonsum	Pihak Aparat Keamanan
1	Karakteristik Pemilik ijinHGU sejak tahun 1968 hingga 2022; berusaha mengamankan aset perusahaan (lahan) agar tidak diambilalih oleh pihak lain dengan membatasi akses masyarakat terhadap SDA	Karakteristik Aparat keamanan yang membantu pihak perusahaan untuk mengamankan lahan HGU
2	Peranan Pelaku utama konflik, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mendorong konflik sekaligus yang dapat meredakan konflik dalam waktu tertentu	Peranan Security approach di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya

Sumber data : Data Primer dan Sekunder Setelah diolah, 2007

Tabel 6. Matriks Relasi Antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat Petani dalam Level Makro dan Mikro

Relasi	Makro	Mikro
Pemerintah	Pihak penentu kebijakan dan perencana pembangunan yang diharapkan mengalami perbaikan perencanaan interaktif/partisipatif, yang mempunyai kuasa terhadap tumbuh dan berkembangnya kehidupan ekonomi, sosial dan politik masyarakat	Pemegang kebijakan dan perencana pembangunan yang memiliki kepentingan dan kekuasaan terhadap pihak perusahaan dan masyarakat.
Perusahaan	Pemegang konsesi yang memiliki hak atas lahan lokasi perkebunan berdasarkan penetapan hak yang diberikan oleh pemerintah	Perusahaan perkebunan yang memiliki klaim hak atas tanah-tanah masyarakat dengan asumsi bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang beroperasi atas dasar pemberian hak-hak pemanfaatan dari pemerintah
Masyarakat	Bagian dari sistem sosial yang lebih luas, dengan tata kehidupannya yang merupakan bagian dari sistem sosial, tidak memiliki lahan atau hasil produksinya hanya dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya bukan untuk diperdagangkan, juga tidak berhenti pada satu titik saja tetapi akan selalu mengalami dinamika kehidupan.	Pihak yang memperjuangkan tanah yang ada di sekitar mereka yang menjadi objek konflik dengan mengajukan kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan kebijakan di wilayah mereka, yang haknya atas lahan perkebunan yang telah diwariskan nenek moyang mereka, diambil alih oleh pihak perusahaan, dan berdasarkan aturan serta hukum adat dapat mengambil inisiatif revolusioner untuk melakukan reformasi agraria atas hak yang telah diambil oleh kepentingan dan kekuasaan

Sumber data ; Data Primer dan Sekunder Setelah diolah, 2007

4. Dampak Positif dan Negatif dari Aspek Ekonomi dan Sosial Keberadaan Perusahaan Perkebunan PT. Lonsum

Sepanjang wilayah perkebunan Balambessi Estate maupun Palangisan Estate terdapat fasilitas transportasi jalan raya untuk menunjang proses distribusi maupun komunikasi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan dengan daerah luar, fasilitas listrik yang mampu menerangi wilayah perkebunan dan wilayah-wilayah lain yang berada di sekitar lokasi perkebunan, serta fasilitas air bersih yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan air minum dan keperluan lainnya masyarakat desa. Selain itu fasilitas pendidikan dan kesehatan dengan tersedianya pusat pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan persyaratan yang dimiliki penduduk di sekitar wilayah perkebunan, tetapi mereka yang sukses menjalani tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan perkebunan karet juga menyempurnakan kehidupan mereka dengan memiliki berbagai fasilitas pribadi.

Dampak positif keberadaan perusahaan perkebunan PT. Lonsum dari aspek ekonomi dan sosial dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Dampak Positif dari Aspek Ekonomi dan Sosial Keberadaan PT. Lonsum, Kabupaten Bulukumba, 2007

Aspek	Sebelum Keberadaan PT. Lonsum	Setelah Keberadaan PT Lonsum
Ekonomi	Hidup sederhana	Pemenuhan fasilitas transportasi, listrik, air bersih, dan komunikasi Peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah/buruh tani Pengembangan perkebunan karet plasma milik masyarakat lokal Adopsi perilaku dalam manajemen bisnis
Sosial	Masyarakat hidup rukun, damai dan tentram	Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan di sekitar wilayah perkebunan Adopsi ilmu pengetahuan tentang budidaya karet Interaksi sosial yang baik antara kedua pihak Rasa solidaritas yang terjalin cukup kuat

Sumber data :Data primer dan sekunder setelah diolah, 2007

Dampak negatif keberadaan perusahaan perkebunan PT. Lonsum dari aspek ekonomi dan sosial dilihat pada Tabel 8.

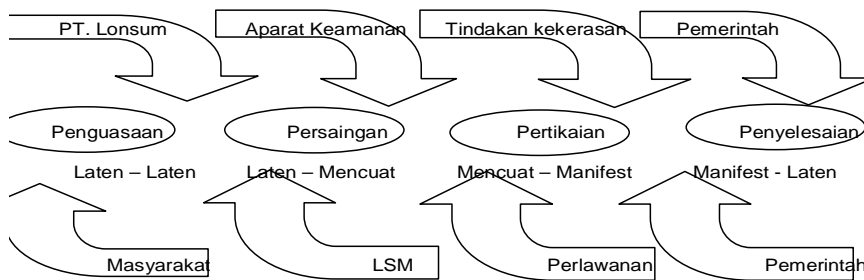
Tabel 8. Dampak Negatif dari Aspek Ekonomi dan Sosial Keberadaan PT. Lonsum, Kabupaten Bulukumba, 2007

Aspek	Sebelum Keberadaan PT. Lonsum	Setelah Keberadaan PT Lonsum
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan tidak menentu, sedikit dan umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja • Sarana dan prsarana transfortasi, pendidikan, kesehatan, dan air bersih tidak memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghalang dalam kegiatan ekonomi masyarakat khususnya bidang pertanian • Terjadi pelapisan ekonomi • Mendomisasi pergerakan ekonomi • Mengundang sinisme
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pengetahuan rendah • Kesehatan tidak terjamin • Pekerjaan tidak menentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan konflik yang berkepanjangan • Menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat penggugat

Sumber data :Data primer dan sekunder setelah diolah, 2007

5. Dialektika Pertimbangan Moral dan Rasional Petani

Fuad dan Maskahan (2000) serta Hae, *et al* (2001) menyatakan bahwa menurut wujudnya, konflik dapat berwujud tertutup (*laten*), mencuat (*emerging*) dan terbuka (*manifest*), juga dapat meningkat (*eskalasi*). Sedangkan menurut level permasalahannya, terdapat dua jenis konflik yakni konflik vertikal dan konflik horizontal. Berdasarkan pernyataan tersebut, wujud konflik yang terjadi di Kabupaten Bulukumba mulanya cenderung tertutup (*laten*) dalam jangka waktu yang cukup lama.

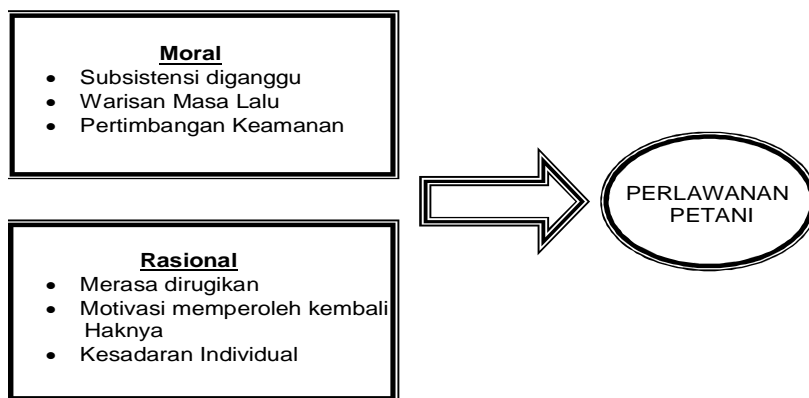


Gambar 4. Model Dialektika Konflik Laten Menjadi Konflik Manifest antara Perusahaan Perkebunan PT. Lonsum dengan Masyarakat

Jika dilihat dari wujud konflik yang terjadi dan model dialektika yang dilakukan kedua belah pihak, maka terlihat bahwa :

1. Konflik laten sangat lama terjadi di Desa Bontomangiring (sejak 1981), yang dipengaruhi oleh kuatnya dukungan dari tokoh masyarakat dan aparat keamanan yang bertugas meredam konflik (sebelum reformasi). Perusahaan dengan mudahnya melakukan penyerobotan di berbagai wilayah dan berkonsentrasi pada usaha perkembangan awal mulainya perusahaan perkebunan karet di Kabupaten Bulukumba.
2. Konflik mencuat ketika hadirnya pihak ketiga seperti LSM serta adanya informasi terjadinya aksi tuntutan masyarakat terhadap penguasaan HGU di lokasi-lokasi yang lain.
3. Konflik *manifest* (terbuka) terjadi karena pihak perusahaan melakukan tindakan agresif dengan bantuan aparat keamanan yang melakukan tindakan anarkis sampai terjadi bentrokan fisik antara kedua belah pihak sehingga pada puncak terjadinya konflik masyarakat sempat mengalami trauma.

Pertimbangan moral dalam konflik agraria relasi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat berdasarkan hasil penelitian melihat protes, perlawanan, bahkan revolusi petani sebagai suatu tindakan defensif melawan kapitalisme yang mengancam keamanan subsistensi masyarakat.



Gambar 5. Pertimbangan Moral dan Rasional Perlawanan Masyarakat

Pertimbangan rasional mendasarkan diri pada konsep manusia sebagai makhluk yang mempunyai kesadaran pribadi individual dan selalu menggunakan perhitungan rasional dalam bertindak.

6. Bentuk-Bentuk Resolusi Konflik dalam Proses Akomodasi

Konflik muncul ketika keinginan dari dua atau lebih kelompok berbenturan atau berbeda dan sekurang-kurangnya sekelompok dari pihak yang terlibat berupaya memaksakan keinginan kelompoknya pada kelompok lain. Konflik dapat dipandang sebagai suatu fenomena sosial yang muncul sebagai dampak dari perubahan yang tiba-tiba atau gradual yang memunculkan perbedaan kepentingan atau keinginan diantara kelompok masyarakat, sehingga resolusi konflik yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah adalah :

- **Pertama**, mengaudit pihak perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba tentang hak-hak penduduk di sekitarnya
- **Kedua**, mengkaji ulang dan kemudian merevisi semua surat keputusan pemberian Hak Guna Usaha perusahaan perkebunan tentang hak-hak penduduk sekitarnya yang terkandung didalamnya; dan merumuskan mekanisme baru untuk redistribusi tanah-tanah yang berada dalam wilayah kelola perkebunan dan diklaim oleh penduduk sekitarnya, dan
- **Ketiga**, menyiapkan infrastruktur sosial agar tanah-tanah yang didistribusikan itu jatuh pada mereka yang berhak, dan fungsi tanah itu adalah sebagai sumberdaya yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani penggarapnya.

Tabel 9. Bentuk Resolusi Konflik Agraria dalam Relasi antara PT. Lonsum dan Masyarakat Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. 2007.

Pihak-Pihak yang terlibat Konflik	Bentuk Resolusi Konflik
PT. Lonsum	Melalui hukum dengan jalan mengajukan banding terhadap lahan perkebunan yang digugat oleh pihak masyarakat
Masyarakat	Melalui jalur hukum dengan bantuan kuasa hukum yang menghasilkan solusi eksekusi lahan yang disengketakan
Pemerintah	Mengaudit pihak perusahaan, mengkaji HGU, dan menyiapkan infrastruktur sosial
LSM	Konsultasi publik, negosiasi, mediasi dan arbitrase
Aparat Keamanan	Menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman semua pihak yang terlibat konflik

Sumber data : Data Primer dan Sekunder Setelah diolah, 2007

Fakta diatas, menyadarkan masyarakat bahwa akibat dari konflik telah menimbulkan banyak korban fisik maupun hancurnya tatanan kehidupan masyarakat, oleh karena itu seluruh komponen masyarakat mendukung adanya upaya penyelesaian konflik secara tuntas dan menyeluruh melalui bentuk-bentuk akomodasi yang telah diuraikan maupun bentuk-bentuk penyelesaian konflik lainnya. Proses penyelesaian konflik memerlukan pihak-pihak yang berpengaruh, khususnya para pemimpin informal atau pemuka adat. Keterlibatan memberikan makna yang mendalam, yaitu efektivitas penyelesaian konflik yang lebih cepat, mudah dan terpolo dengan baik

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kesimpulan hasil penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Relasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat digambarkan sebagai hubungan keterikatan antara kepentingan pemerintah terhadap keberadaan perusahaan perkebunan PT. Lonsum, kekuasaan pemerintah sebagai penentu kebijakan, serta hak guna usaha yang dimiliki PT. Lonsum dan hak masyarakat yang merupakan warisan nenek moyang.
2. Keberadaan perusahaan perkebunan PT. Lonsum menimbulkan dampak positif dan negatif dari aspek sosial maupun ekonomi
3. Dialektika konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Bulukumba telah berkembang dari konflik yang cenderung tertutup (laten), kemudian mencuat dan selanjutnya menjadi konflik *manifest* akibat tindakan agresif pihak perusahaan yang mendorong terjadinya tindakan perlawanan yang didasari oleh pertimbangan moralitas melalui protes, perlawanan, bahkan revolusi petani sebagai suatu tindakan defensif melawan kapitalisme yang mengancam keamanan subsistensi masyarakat, dan pertimbangan rasionalitas melalui kesepakatan melakukan perlawanan yang dinilai sebagai cara yang efektif dan efisien dalam menuntut hak-hak mereka.
4. Berbagai ikhtiar rekonsiliasi yang telah dilakukan dijadikan modal dalam mewujudkan penyelesaian konflik secara menyeluruh dan permanen sebagai wujud bentuk resolusi konflik yakni melalui konsultasi publik, negosiasi, mediasi dan arbitrase.

E. REKOMENDASI

1. Setiap masyarakat pada dasarnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dalam arti luas, termasuk perubahan lingkungan akibat masuknya pihak luar dalam wilayah kekuasaan mereka dengan berbagai bentuk tindakan untuk menguasai wilayah tersebut. Akan tetapi perubahan yang terjadi melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum adat mereka, dapat mengaburkan orientasi masyarakat yang bersangkutan.
2. Penyelesaian konflik harus dilakukan atas dasar prinsip-prinsip sosial yang dianut masyarakat adat. Apa yang dihargai oleh masyarakat adat, harus dihargai pula oleh pihak luar dan pemerintah atau undang-undang.
3. Sumber konflik yang menjadi akar gerakan sosial adalah sikap pemerintah yang lebih berpihak kepada pemilik modal usaha dalam membangun, dengan orientasi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini, tidak hanya mengabaikan aspirasi dari masyarakat lokal, tetapi juga melukainya, sehingga muncul sikap agresif akibat perlakuan tidak adil. Perlakuan tidak adil terus berlanjut yang melahirkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga para pengambil kebijakan mulai dari tingkat pusat sampai daerah, harus berani mengubah komitmen bahwa mereka bekerja untuk kepentingan rakyat sebagai jati diri manajemen pemerintahan.
4. Pengembangan model dialektika dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Bulukumba khususnya dan konflik-konflik agraria lainnya di Indonesia.
5. Penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan perusahaan perkebunan PT. Lonsum berakibat pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat Bulukumba. Meskipun keberadaannya menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin pesat, namun disisi lain menimbulkan konflik berkepanjangan. Sehingga dirasa perlu melakukan penelitian lanjutan tentang akibat dari aspek lain dan proses resolusi yang tepat dan cepat dalam penyelesaian konflik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar dan Rustiadi, E. 2000. *Pembangunan Tata Ruang (Spesial) Wilayah Pedesaan dalam Rangka Pembangunan Regional. Makalah pada Temu Pakar tentang Penataan Ruang Wilayah Pedesaan di Jakarta*, 14-15.
- Agusta, Ivanovich dan Undang Fadjar. 2003. *Konflik Perkebunan Mutakhir dan Manajemen Sosial di Indonesia*. Mimbar Sosek: Jurnal-Ekonomi Pertanian. Vol. 16 No.2, Agustus 2003.
- Ajitjondro, G. Junus. 2002. *Aksi Petani, Represi Militer dan Sosialisme Marga: memperluas Wacana Permasalahan Tanah di Indonesia*. Dalam *Berebut Tanah, Beberapa Kajian Berspektif Kampus dan Kampung*, diedit oleh Lonuela, Anu dan Zakaria, R.Y. INSIST. Yogyakarta.
- Al araf dan Puryadi. 2002. *Janggal, Pengalihan Kebun Kalibakar*. Dari webpage www.kompas.com. Diakses pada tanggal 25 April 2004
- Bachriadi, Dianto dan Anto Lucas. 2001. *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan, Jakarta*. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
- _____. 2002. *Berebut Tanah. Beberapa Kajian Berspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta : Insist Press. Jurnal Antropologi Indonesia. University dan Karsa (Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraris)
- Bungin, B. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Kontemporer*. PT. Raja Qiafindo Persada. Jakarta
- Bradford, K.D. and Stringfellow, A. 2001. *Managing Conflict to Improve The Effectiveness of Ad-Hoc Marketing Team*. Departement of Marketing University of Florida.
- Brown, K. Tompkins, E. and Adger, W.N. 2001. *Trade-off Analysis for Participatory Coastal Zone Decision-making-overseas Development Group*. University of East Anglia, UK.
- Down To Earth. 1999. *Perjuangan Merebut Tanah*. No. 40. Februari 1999. www.gn.apc.org/dte/40ila.htm.
- Fauzi, N., Tadjudin D. Fauzi N., Winarto YT. 2001. *Otonomi Daerah Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.

- Fisher, Simon et al. 2001. *Mengelola Konflik*. The British Council Indonesia. Jakarta.
- Fuad, H.F. dan S.Maskanah. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Pustaka Latin. Bogor.
- Habib, Achamd. 2004. *Konflik Antaretnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*. PT LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Harrison, David A., Kenneth H. Price, and Myrtle P. Bell (1998), *Beyond Relational Demography: Time and the Effects of Surface-and Deep-Level Diversity on Work Group Cohesion*, *Academy of Management Journal*, 41(1), 96-107.
- Ibrahim, Tamzil., 2001. "PASANG" *Studi Kelembagaan Yang Menunjang Pelestarian Sumber daya Hutan Di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba-Sulawesi Selatan*. Thesis – Tidak dipublikasikan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ibrahim, Jabal Tarik. 2002. *Sosiologi Pedesaan*. UMM Pres. Malang
- Jos, Hafid. 2001. *Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah*. Bogor: Pustaka Latin.
- Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media
- Kompas. 2003. *Gerakan Petani Melawan Ketidakadilan*. 28 September. Hlm. 25.
- Kusworo, Ahmad. 2000. *Perambah Hutan Atau Kambing Hitam. Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung*. Pustaka latin. Bogor.
- Lewicky, R.J. 2001. *Essential Negotiation*. Second edition. New York, McGraw Hill.
- Lounela, Anu dan Zakaria, R Yando (eds). 2002. *Berebut Tanah; Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Insist; Jurnal Antropologi Indonesia Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Miall, H. Oliver Ramsbotham Woodhouse. Diterjemahkan oleh Tri Budi Sartono. 2002. *Resolusi Konflik Kontemporer*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Mitchell, Bruce, B. Setiawan, Dwita H. Rahmi. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Miliken, F. J. and Martins L.L. 1996. *Searching for Common Threads: Understanding the Multiple Effects of Diversity in Organizational Groups*, *Academy of Management Review*, 21(2), 402-423
- Morse, Janice M. 1994. "Designing Funded Qualitative Research" dalam *Handbook of Qualitative Research*. Norman K, Denzin & Yvona S. Lincoln (editors). Thousand Oaks K, London, New Delhi: Sage Publications.
- Ngadisah Dr MA. 2003. *Konflik pembangunan dan Gerakan Sosial Politik*. Penerbit Pustaka Raja. Yogyakarta.
- Paige, Jeffery M. 2004. *Resolusi Agraria; Gerakan Sosial dan Pertanian Ekspor di Negara-Negara Dunia Ketiga*. Pasuruan : Penerbit Pedati
- Pelzer, Karl J. 1991. *Sengketa Agraria Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Popkin, Samuel. 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. California: California University Pres.
- Sakai, Minako. 2001. *Sengketa Tanah Era Reformasi Politik dan Desentralisasi Indonesia*. Makalah pada Simposium International Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA Ke-2. Kampus University Andalas. Padang.
- Sanderson S K. 2000. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salman, Darmawan. 1996. *Protes Petani dan Integrasi Pedesaan, Tinjauan Umum Era Orde Baru*. Majalah Prisma No. 9.
- Suhendar E dan Winarni B Y. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Sitorus M T F. dan Wiradi, G. 1999. "Kata Pengantar" dalam *SMP Tjondronegoro. Sosiologi Agraria*. Kumpulan Tulisan Terpilih. Bandung: Yayasan AKATIGA
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sodiki, H Achmad. 1996. *Konflik Pemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan*. Majalah Prisma. No. 9.
- Stake R.E. 1994. "Case Studies". Dalam N.K. Denzine dan I.Y. Lincoln (Eds)., *Handbook of Qualitatif Research*. London: Sage.
- Tempo. 2004. *Sengketa Dalam Kronologis*. 7 Januari 2004.
- Turner HJ. 2001. *The Structure of Sociological Theory*. Sixth Edition. University of California. Wadsworth Publishing Company.
- Wahyudi. 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani*. Studi Kasus Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang. UMM Press, Malang.
- Wallace, Geoffrey. 1993. *Institutional conflict work in democratic societies*. UCI Ombudsman: The Journal.

- Warner M, Jones P. 1998. *Assessing the need to manage conflict in community based natural resource projects*. London: ODI; Natural Resource Peprerspective. P. 35.
- Wiradi, Gunawan. 2000. *Reforma Agraria : Perjalanan yang Belum Berakhir*. Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____. 2004. *Masalah Agraria: Masalah Penghidupan dan Kedaulatan Bangsa*. Makalah Stadium General Jurusan Sosek Tanggal 17 Mei 2004. Fakultas Pertanian IPB, Bogor.
- Wijardjo, B., Alik, I., Fauzi, N dan Rayo, A. 2001. *Konflik: Bahaya atau Peluang; Panduan Latihan Menghadapi dan Menangani Konflik Sumber Daya Alam*. Pustaka Pelajar.
- Ya'kub, Achmad., 2004. *Agenda Neoliberal : Menyusup Melalui Kebijakan Agraria di Indonesia*. Jurnal Analisis Sosial Akatiga, Bandung
- Yin, Robert L. 1984. *Case Study Research, Design and Methods*, Sage Publication, Beverly Hills-London-New Delhi.
- Zubir, Zaiyardan. 2002. *Radikalisme Kaum Pinggiran*. INSIST. Yogyakarta